

**Kebijakan Zonasi dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara
(Studi Kasus Sistem Zonasi SMA Negeri 1 dan 3 Semarang)**

Muhammad Octavian Qhuraydillah

Email : Muh.octavian@gmail.com

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin.

Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP., M.PP.

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos: 1296

Website: <https://fisip.undip>. Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Semarang. Fokus penelitian diarahkan pada analisis aspek pemenuhan hak pendidikan warga negara, termasuk akses, pelayanan, keuntungan, kerugian, kelemahan, dan bentuk kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan siswa, orang tua, dan guru di kedua sekolah, pengisian kuesioner, serta observasi langsung di lapangan. Data pendukung tambahan diperoleh dari dokumen kebijakan resmi dan laporan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Analisis data dilakukan dengan pendekatan triangulasi untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

Penelitian ini memberikan manfaat akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan, pemerataan pendidikan (Educational Equity Theory), teori keadilan distributif, dan teori pelayanan sektor publik. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan institusi pendidikan dalam meningkatkan implementasi kebijakan zonasi agar lebih efektif, adil, dan inklusif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi berhasil memberikan akses pendidikan yang lebih merata, terutama bagi siswa yang tinggal dekat dengan sekolah. Namun, kebijakan ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kuota, ketimpangan fasilitas, dan manipulasi data domisili oleh sebagian orang tua siswa. Selain itu, pelayanan di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 secara umum mempermudah proses pendaftaran siswa, meskipun masih terdapat kendala teknis dalam sistem daring dan validasi lokasi rumah.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem zonasi, meskipun memiliki dampak positif dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan, belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi prinsip pemerataan pendidikan dan keadilan distribusi pendidikan. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan edukasi masyarakat untuk memastikan kebijakan zonasi mampu memenuhi hak pendidikan warga negara secara merata dan adil.

Kata Kunci: Kebijakan zonasi, hak pendidikan, pemerataan pendidikan, pelayanan sektor publik, Kota Semarang.

Zoning Policy in Fulfilling Citizens' Right to Education

(Case Study of the Zoning System at SMA Negeri 1 and 3 Semarang)

Muhammad Octavian Qhuraydillah

Email: Muh.octavian@gmail.com

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin.

Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP., M.PP.

Department of Politics and Government

Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Postal Code: 1296

Website: <https://fisip.undip>. Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research aims to explore the implementation of the zoning system policy in the New Student Admission (PPDB) in Semarang City. The focus of the research is directed towards analyzing aspects of fulfilling citizens' educational rights, including access, services, benefits, drawbacks, weaknesses, and forms of fraud that occur during the implementation of the policy.

The research method used is descriptive qualitative with an analytical approach. Data collection was conducted through in-depth interviews with students, parents, and teachers at both schools, questionnaire filling, and direct field observations. Additional supporting data were obtained from official policy documents and reports from the Semarang City Education Office. Data analysis was conducted using a triangulation approach to enhance the validity and reliability of the research findings.

This research provides academic and practical benefits. Academically, this research contributes to the development of educational theory, educational equity theory, distributive justice theory, and public sector service theory. Practically, this research can serve as an evaluation material for the government and educational institutions to improve the implementation of zoning policies to be more effective, fair, and inclusive .

The research results show that the zoning system policy has successfully provided more equitable access to education, especially for students living near schools. However, this policy also faces various challenges, including quota limitations, facility disparities, and manipulation of residency data by some parents. In addition, the services at SMA Negeri 1 and SMA Negeri 3 generally facilitate the student registration process, although there are still technical issues in the online system and home location validation.

Thus, this research concludes that the zoning system, although having a positive impact on improving educational accessibility, has not yet been fully effective in meeting the principles of educational equity and justice in educational distribution. Stricter supervision, improvement of public service quality, and community education are needed to ensure that the zoning policy can fulfill citizens' right to education equitably and fairly.

Keywords: *Zoning policy, right to education, educational equity, public sector services, Semarang City.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Negara diartikan sebagai organisasi yang terbentuk dalam sebuah wilayah dengan memaksakan kekuasaan yang sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya serta dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan itu sendiri.¹ Salah satu upaya negara untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan secara merata melalui pemerintah dengan menerapkan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem zonasi mulai diimplementasikan secara nasional sejak tahun 2017, bertujuan untuk menghilangkan stigma sekolah favorit, mengurangi ketimpangan akses pendidikan, dan meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Dalam praktiknya, kebijakan ini menetapkan bahwa prioritas penerimaan siswa didasarkan pada kedekatan jarak rumah dengan sekolah, sehingga diharapkan dapat memberikan akses yang lebih merata kepada semua kalangan.²

Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, menjadi salah satu wilayah yang menerapkan sistem zonasi secara konsisten dalam PPDB. Dengan tingkat urbanisasi yang tinggi dan disparitas sosial-ekonomi yang cukup mencolok, implementasi kebijakan zonasi di Kota Semarang memiliki tantangan tersendiri.³ Sekolah-sekolah unggulan seperti SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Semarang sering menjadi pilihan utama masyarakat, yang menyebabkan tingginya tingkat persaingan untuk masuk ke sekolah-

sekolah tersebut. Dalam konteks ini, sistem zonasi diharapkan mampu mengurangi ketimpangan akses pendidikan antarwilayah, terutama di daerah padat penduduk, sembari tetap memenuhi prinsip keadilan bagi siswa yang memiliki prestasi akademik tinggi tetapi tinggal di luar zona sekolah tujuan.

Namun, pelaksanaan sistem zonasi tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan adanya kelemahan, seperti manipulasi data domisili, keterbatasan kuota di sekolah tertentu, dan ketidakmerataan fasilitas pendidikan. Selain itu, siswa yang tinggal di luar zona sering kali merasa dirugikan karena kehilangan kesempatan untuk masuk ke sekolah yang diinginkan meskipun memiliki prestasi akademik yang baik. Tantangan lain adalah rendahnya literasi digital masyarakat dalam memahami prosedur pendaftaran online, yang mengakibatkan kendala administratif dan teknis selama proses PPDB. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan zonasi bertujuan untuk pemerataan pendidikan, implementasinya masih jauh dari sempurna.⁴

Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi lebih dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di Kota Semarang, dengan studi kasus pada SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3. Penelitian ini menganalisis berbagai dimensi, seperti akses, pelayanan, keuntungan, kerugian, kelemahan, dan kecurangan dalam pelaksanaan sistem zonasi. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori pendidikan, pemerataan

¹ Budiardjo Prof. Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

² M.Si. Dra. Yufriawati, *Sistem Zonasi Di Indonesia*, ed. S.Psi. Cetak: Dr. Aos Santosa, M.Pd. Dr. Sabar Budi Raharjo Erni Hariyanti (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Redaksi:, n.d.).

³ Taufiqi Ilham Adzim, "Implementasi Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA Di Kota Semarang Tahun 2021/2022," *Journal of Politic and Government*, 2022.

⁴ Yunike Sulistyosari and Siti Irene Dwiningrum, "Social Justice In The Implementing Zoning School Policy (Case Study in Temanggung Regency)," 2020, <https://doi.org/10.4108/eai.4-8-2020.2302428>.

pendidikan (Educational Equity Theory), teori keadilan distributif, teori kesejahteraan, dan teori pelayanan sektor publik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan zonasi mampu memenuhi hak pendidikan warga negara secara adil, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini.

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini tidak hanya mengungkapkan tantangan dan peluang yang ada dalam sistem zonasi, tetapi juga memberikan kontribusi akademik yang signifikan bagi pengembangan teori dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan zonasi, sehingga dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara di Kota Semarang, dengan fokus pada SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Semarang. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai aspek akses, pelayanan, keuntungan, kerugian, kelemahan, dan kecurangan dalam sistem zonasi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa sebagai informan utama. Selain itu, kuesioner terbuka digunakan untuk mendapatkan perspektif langsung dari responden terkait pengalaman mereka. Data sekunder diambil dari dokumen

kebijakan resmi, laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, serta literatur relevan. Observasi langsung dilakukan di lokasi penelitian untuk memahami proses dan situasi di lapangan.⁵

Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas dan reliabilitas data dijamin melalui metode triangulasi sumber dan teknik analisis. Penelitian ini menggunakan kerangka teori pendidikan untuk memahami konteks pembelajaran, teori pemerataan pendidikan (Educational Equity Theory) untuk menilai kesetaraan akses, teori pemerataan untuk menganalisis distribusi sumber daya pendidikan, dan teori pelayanan sektor publik untuk mengevaluasi kualitas pelayanan dalam sistem zonasi.⁶ Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terkait efektivitas kebijakan zonasi dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan yang adil dan merata.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Semarang telah memberikan dampak signifikan pada aspek aksesibilitas dan pelayanan pendidikan, meskipun tidak terlepas dari berbagai tantangan.

SMA Negeri 1 Semarang			SMA Negeri 3 Semarang		
Kelas X	Kelas XI	Kelas XII	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII

⁵ M.Sc. Dr. J.R. Raco, M.E., "Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya," *PT Grasindo*, 2010, 146.

⁶ M.Pd. Dr. Dra. Erni Murniarti, S.H., "Analisis Kebijakan Pendidikan," *Journal GEEJ 7*, no. 2 (2020).

11 Siswa 73%	10 Siswa 66%	9 Siswa 62%	9 Siswa 60%	10 Siswa 66%	10 Siswa 67%
4 Siswa 26%	5 Siswa 34%	6 Siswa 37%	6 Siswa 40%	5 Siswa 34%	5 Siswa 33%

Tabel 1. 1 Akses Sistem Zonasi SMA Negeri 1 dan 3 Semarang

SMA Negeri 1 Semarang			SMA Negeri 3 Semarang		
Kelas X	Kelas XI	Kelas XII	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
12 Siswa (80%)	11 Siswa (75%)	10 Siswa (70%)	11 Siswa (75%)	12 Siswa (80%)	11 Siswa (75%)
3 Siswa (20%)	4 Siswa (25%)	5 Siswa (30%)	4 Siswa (25%)	3 Siswa (20%)	4 Siswa (25%)

Tabel 1. 2 Pelayanan Sistem Zonasi SMA Negeri 1 dan 3 Semarang

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Semarang memberikan dampak signifikan terhadap pemenuhan hak pendidikan warga negara, terutama dalam hal pemerataan akses pendidikan. Mayoritas siswa di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Semarang merasakan keuntungan dari kebijakan ini, seperti kemudahan akses, pengurangan biaya transportasi, dan waktu perjalanan yang lebih efisien. Sebanyak 66,7% siswa SMA Negeri 1 dan 64,4% siswa SMA Negeri 3 setuju bahwa kebijakan ini mempermudah pendaftaran dan mengurangi ketimpangan sosial. Pada aspek pelayanan, hasil penelitian menunjukkan bahwa SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Semarang telah memberikan

dukungan administrasi yang cukup baik, dengan tingkat kepuasan masing-masing 77% dan 75,3%. Namun, berbagai kendala masih ditemui, termasuk manipulasi data domisili seperti "titip KK," ketidakakuratan dalam verifikasi lokasi rumah, dan keterbatasan kuota di wilayah padat penduduk. Kendala ini menyebabkan ketidakadilan bagi siswa berprestasi yang tidak diterima karena berada di luar zona prioritas.

Di sisi lain, implementasi sistem zonasi juga menghadapi kendala teknis, seperti gangguan server dan rendahnya kemampuan perangkat teknologi siswa dari keluarga ekonomi rendah. Masalah ini memperburuk kesulitan dalam proses pendaftaran daring, terutama di wilayah dengan koneksi internet terbatas. Selain itu, kualitas pendidikan di beberapa sekolah unggulan turut menjadi perhatian, karena zonasi lebih mengutamakan jarak dibandingkan prestasi akademik. Meski kebijakan zonasi bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan sesuai dengan prinsip Educational Equity Theory dan keadilan distributif, efektivitasnya masih memerlukan peningkatan. Perbaikan dalam pengawasan, penambahan infrastruktur teknologi, dan diversifikasi jalur penerimaan berbasis prestasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memenuhi hak pendidikan secara adil dan merata.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di Kota Semarang memiliki dampak yang signifikan terhadap aksesibilitas pendidikan, khususnya di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3. Mayoritas siswa di kedua sekolah tersebut merasa bahwa kebijakan zonasi memberikan kemudahan dalam mengakses pendidikan, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar sekolah.

Hal ini sesuai dengan prinsip Educational Equity Theory yang mengedepankan pemerataan akses pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.⁷ Berdasarkan hal tersebut ada beberapa aspek yang mempengaruhi kebijakan zonasi :

1. Akses Pendidikan

Indikator Akses Pendidikan:

- Persentase Kepuasan Aksesibilitas Pendidikan:
 - *Persentase siswa yang merasa kebijakan zonasi mempermudah akses pendidikan di SMA Negeri 1 (66,7%) dan SMA Negeri 3 (64,4%).*
 - *Indikator jarak fisik antara rumah dan sekolah yang lebih dekat, serta pengaruhnya terhadap waktu dan biaya transportasi.*
 - *Evaluasi dampak pengurangan biaya dan waktu transportasi, apakah ini signifikan bagi siswa dan keluarga, terutama yang berasal dari keluarga ekonomi rendah.*
 - *Ketersediaan dan distribusi fasilitas pendidikan di setiap zona, seperti sarana dan prasarana, yang turut mempengaruhi kualitas pendidikan yang diakses oleh siswa di zona tersebut.*

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akses Pendidikan:

- **Geografi dan Infrastruktur:** Siswa yang tinggal di area terpencil atau dengan akses transportasi terbatas bisa merasakan dampak negatif meskipun kebijakan zonasi dirancang untuk meratakan distribusi pendidikan.

- **Tingkat Pendapatan Keluarga:** Keluarga dengan pendapatan rendah mungkin tetap mengalami kesulitan meskipun biaya transportasi berkurang, terutama karena masalah perangkat atau akses internet untuk pendaftaran daring.
- **Ketersediaan Pilihan Pendidikan Alternatif:** Ketidaktersediaan sekolah-sekolah yang memadai di setiap zona juga menjadi hambatan dalam pemerataan pendidikan yang diinginkan oleh kebijakan zonasi.

Kelemahan Akses Pendidikan:

- **Siswa Berprestasi dari Luar Zona:** Sistem zonasi tidak sepenuhnya mengakomodasi siswa berprestasi yang tidak tinggal dalam zona sekolah. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan bagi siswa berprestasi yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk ke sekolah pilihan mereka karena terbatasnya kuota dan persaingan di dalam zona.

2. Pelayanan Sistem Zonasi

Indikator Pelayanan:

- **Tingkat Kepuasan Pelayanan Administratif:**
 - *Evaluasi persentase kepuasan siswa terhadap pelayanan administratif di SMA Negeri 1 (77%) dan SMA Negeri 3 (75,3%).*
 - *Tingkat kemudahan dalam pendaftaran daring, serta kecepatan dan efektivitas respons terhadap masalah atau kendala*

⁷ Meira Levinson, Tatiana Geron, and Harry Brighouse, "Conceptions of Educational Equity,"

yang dihadapi oleh siswa selama proses pendaftaran.

- Kendala dan Masalah dalam Pelayanan:
 - Tingkat kegagalan sistem daring, seperti error pada situs pendaftaran, masalah dalam validasi alamat rumah, serta pengaruhnya terhadap waktu dan kenyamanan siswa.
 - Evaluasi kualitas pelayanan berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan menurut Zeithaml: tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan:

- Infrastruktur Teknologi: Keterbatasan infrastruktur digital dan teknologi yang mendukung proses pendaftaran daring, serta ketergantungan pada koneksi internet yang stabil. Ini bisa menjadi masalah, terutama bagi siswa dari keluarga ekonomi rendah.
- Kompetensi Petugas Administrasi: Kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh tingkat pelatihan dan kesiapan petugas administratif dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul, serta tingkat empati mereka dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan.
- Keterbatasan Anggaran: Banyaknya anggaran yang digunakan untuk infrastruktur pendidikan dasar menyebabkan minimnya dana yang tersedia untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi secara digital.

Kelemahan Pelayanan:

- Kendala Sistem Daring: Proses pendaftaran daring yang seringkali mengalami kendala teknis, seperti

kesalahan validasi alamat dan masalah pada sistem server yang mengganggu kelancaran pendaftaran, terutama bagi siswa dari keluarga dengan akses terbatas ke perangkat dan internet.

- Kurangnya Dukungan Lapangan: Walaupun sebagian besar siswa merasa didukung oleh staf sekolah, terdapat kekurangan dalam menyediakan layanan lapangan yang lebih intensif bagi siswa yang lebih membutuhkan bimbingan atau yang mengalami kesulitan dalam administrasi.

3. Kelemahan dan Kecurangan

Indikator Kelemahan dan Kecurangan:

- Manipulasi Data Domisili:
 - Jumlah kasus manipulasi alamat domisili yang ditemukan, seperti pemalsuan alamat atau "titip KK" untuk mendekati tempat tinggal ke zona sekolah pilihan.
 - Dampak manipulasi terhadap kualitas pemerataan pendidikan, mengurangi keadilan bagi siswa yang tinggal jujur di zona tetapi tidak diterima karena banyaknya manipulasi data.
- Ketidakadilan dalam Alokasi Kuota:
 - Jumlah siswa yang tidak diterima di sekolah tujuan meskipun memenuhi kriteria akademik karena kuota terbatas.
 - Evaluasi persaingan ketat di wilayah padat penduduk, yang menyebabkan anak-anak dari wilayah ini seringkali tidak mendapatkan tempat meskipun tinggal dekat dengan sekolah.

Faktor-faktor Penyebab Kelemahan dan Kecurangan:

- Kurangnya Pengawasan: Pengawasan yang tidak memadai terhadap proses verifikasi data domisili menyebabkan banyaknya manipulasi data yang merugikan siswa yang tinggal di zona asli.
- Persaingan Ketat: Dalam zona dengan populasi tinggi, persaingan yang sangat ketat menyebabkan beberapa siswa yang seharusnya mendapatkan tempat di sekolah favorit malah tidak diterima, meskipun berprestasi.
- Keterbatasan Kuota: Keterbatasan kapasitas sekolah menjadi salah satu penyebab ketidakadilan yang terjadi, karena banyak siswa yang tinggal di luar zona harus berkompetisi untuk mendapatkan tempat.

4. Keuntungan Sistem Zonasi

Indikator Keuntungan:

- Kemudahan Akses Pendidikan:
 - Sistem zonasi membantu memberikan akses yang lebih merata kepada siswa di seluruh wilayah kota, terutama siswa yang tinggal dekat dengan sekolah yang memiliki fasilitas memadai.
 - Pengurangan biaya transportasi bagi siswa yang sebelumnya harus menempuh jarak jauh.
- Pengurangan Beban Ekonomi:
 - Siswa dari keluarga dengan pendapatan rendah dapat mengurangi pengeluaran untuk transportasi, yang memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pendidikan tanpa dibebani biaya perjalanan.
- Pemerataan Pendidikan:

- Penyebaran siswa yang lebih merata ke berbagai sekolah, menghindari konsentrasi siswa yang berlebihan di sekolah-sekolah favorit.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keuntungan:

- Proses Verifikasi yang Efektif: Keuntungan dari sistem zonasi bisa lebih maksimal jika verifikasi lokasi rumah dilakukan dengan benar, mengurangi potensi manipulasi data domisili.
- Peningkatan Fasilitas Sekolah: Menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas di semua zona, termasuk di daerah terpencil, untuk memastikan semua siswa mendapatkan pendidikan yang setara.

5. Kerugian Sistem Zonasi

Indikator Kerugian:

- Ketidakadilan bagi Siswa Berprestasi:
 - Siswa yang memiliki prestasi tinggi tetapi tinggal di luar zona merasa dirugikan, karena mereka tidak dapat diterima di sekolah favorit meskipun memiliki nilai akademik yang sangat baik.
- Tantangan Bagi Sekolah di Zona Padat:
 - Keterbatasan kapasitas sekolah di wilayah padat penduduk, seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3, menyebabkan banyak siswa yang tidak diterima meskipun tinggal dekat dengan sekolah.

Faktor-faktor Penyebab Kerugian:

- Ketidakakuratan Verifikasi Domisili: Masalah dengan verifikasi lokasi rumah menyebabkan ketidakadilan,

terutama bagi siswa berprestasi yang tinggal di luar zona.

- Pembatasan Kuota yang Ketat: Dalam zona dengan kepadatan tinggi, persaingan yang ketat untuk mendapatkan tempat di sekolah favorit sering kali merugikan siswa berprestasi yang tinggal di zona tersebut.
- Kurangnya Fasilitas Pendidikan Berkualitas di Semua Zona: Jika fasilitas sekolah tidak tersebar merata, maka kebijakan zonasi berpotensi menghasilkan ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah di wilayah yang lebih padat dan lebih terpencil.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan sistem zonasi memiliki tujuan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, tantangan terkait dengan manipulasi data, ketidakadilan kuota, kendala teknis, dan perbedaan kualitas fasilitas di setiap sekolah masih menjadi faktor yang perlu diatasi untuk memastikan kebijakan ini dapat benar-benar mencapai tujuannya.

Namun, kebijakan ini masih menghadapi kendala teknis seperti kesalahan validasi data alamat dan manipulasi domisili. Praktik seperti "titip KK" atau pemalsuan alamat menunjukkan adanya celah dalam implementasi kebijakan ini yang dapat mengurangi keadilan bagi siswa yang mematuhi aturan dengan jujur.

Dari segi aspek pelayanan dalam implementasi kebijakan zonasi juga memberikan temuan yang menarik. Pelayanan di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 dinilai cukup memadai oleh mayoritas responden. Guru dan staf sekolah dianggap responsif dalam membantu calon siswa mengatasi kendala administratif, dengan tingkat kepuasan mencapai 77% di

SMA Negeri 1 dan 75,3% di SMA Negeri 3. Meski demikian, beberapa perbedaan signifikan ditemukan antara kedua sekolah. Di SMA Negeri 1, tantangan utama adalah keterbatasan kuota yang menyebabkan persaingan ketat, sementara di SMA Negeri 3, gangguan teknis dalam sistem daring menjadi masalah dominan. Temuan ini menunjukkan perlunya perbaikan infrastruktur teknologi dan pengawasan administrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan zonasi.

Kendala lain yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah ketimpangan kuota dan fasilitas di sekolah tertentu. Beberapa wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti sekitar SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 mengalami ketidakseimbangan dalam distribusi siswa, di mana siswa yang tinggal dekat sekolah tetap tidak diterima karena kuota sudah penuh. Selain itu, siswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah sering kali mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran daring akibat keterbatasan perangkat teknologi dan koneksi internet. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur digital untuk mendukung kebijakan zonasi yang lebih inklusif dan merata.

Secara keseluruhan, penelitian ini mencerminkan bahwa kebijakan sistem zonasi di Kota Semarang, meskipun telah memberikan dampak positif terhadap pemerataan pendidikan, masih memerlukan berbagai perbaikan. Kendala teknis, manipulasi data, dan ketidakmerataan kualitas pendidikan menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti diversifikasi jalur penerimaan, peningkatan pengawasan, dan edukasi kepada masyarakat untuk memastikan bahwa tujuan utama kebijakan zonasi, yaitu pemerataan pendidikan dan pemenuhan hak

pendidikan warga negara, dapat tercapai secara optimal.

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Semarang, dengan fokus pada dimensi kelemahan, kecurangan, pelayanan, akses, keuntungan, dan kerugian yang ditimbulkan. Meskipun kebijakan zonasi bertujuan untuk memperbaiki pemerataan pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya efektif. Masalah utama yang dihadapi meliputi manipulasi data, keterbatasan kuota di sekolah-sekolah tertentu, serta ketimpangan fasilitas pendidikan, yang menghambat tercapainya kesetaraan dalam akses pendidikan. Selain itu, kualitas pelayanan publik yang belum optimal, terutama dalam hal pengelolaan sistem pendaftaran daring dan kurangnya pemahaman masyarakat, juga turut mempengaruhi efektivitas kebijakan ini.

Berdasarkan teori pemerataan pendidikan dan pelayanan sektor publik, penelitian ini menemukan bahwa meskipun sistem zonasi memberikan akses yang lebih adil bagi siswa, terutama dalam hal jarak, masih ada banyak kendala teknis dan sosial yang perlu diatasi. Manipulasi data yang dilakukan oleh beberapa pihak, seperti pemalsuan alamat, mengurangi keadilan dalam sistem ini. Selain itu, Sekolah-sekolah di daerah

KESIMPULAN

dengan kepadatan penduduk tinggi mengalami kesulitan dalam menangani persaingan yang ketat, sementara wilayah yang kekurangan sekolah negeri harus bergantung pada sekolah swasta. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan yang sesungguhnya belum tercapai, karena kualitas pendidikan di beberapa sekolah masih kurang memadai.

Sebagai langkah perbaikan, penelitian ini menyarankan beberapa tindakan untuk meningkatkan efektivitas sistem zonasi. Pertama, peningkatan infrastruktur digital dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik manipulasi data dapat mengurangi potensi kecurangan. Kedua, perlu ada penambahan kuota di sekolah-sekolah dengan permintaan tinggi dan pembukaan sekolah negeri baru di daerah yang kekurangan fasilitas pendidikan. Ketiga, sistem penerimaan siswa perlu didiversifikasi dengan mempertimbangkan prestasi akademik untuk memberikan kesempatan yang lebih adil bagi siswa berprestasi. Terakhir, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur zonasi dan evaluasi berkala terhadap kebijakan ini sangat penting untuk memastikan tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Adzim, Taufiqi Ilham. "Implementasi Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA Di Kota Semarang Tahun 2021/2022." *Journal of Politic and Government ...*,

2022.

Aini, Ela Nur, and Harto Wicaksono. "Kontruksi Budaya Berprestasi: Studi Kasus Implementasi Sistem Zonasi SMA Negeri 1 Semarang." *Jurnal Solidarity* 9, no. 1 (2020): 879–91.

- Asmendri, and Hendris Dedi. "THE IMPLEMENTATION OF ZONING SYSTEM POLICY AND THE Asmendri" 21, no. 2 (2022): 138–54.
- Beatriz Pont. *Equity and Quality in Education*, 2015. <https://doi.org/10.1787/9789264225442-6-en>.
- Budi Raharjo, Sabar, Yufriawati, Ais Rahmawati, and Joko Purnama. *Penerimaan Peserta Didik Berdasarkan Zonasi Pendidikan*, 2020.
- Budi Setiyono. *Model & Desain Negara Kesejahteraan*. Edited by Irwan Kurniawa. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2018.
- Dr. BADA & Steve Olusegun. "Constructivism Learning Theory: A Paradigm for Teaching and Learning." *Journal of Research and Method in Education* 5, no. 6 (2015): 23–34. <https://doi.org/10.9790/7388-05616670>.
- Dr. Dra. Erni Murniarti, S.H., M.Pd. "Analisis Kebijakan Pendidikan." *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).
- Dr. J.R. Raco, M.E., M.Sc. "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya." *PT Grasindo*, 2010, 146.
- Dr. Rahmat Hidayat, MA Dr. Abdillah, S.Ag, M.Pd. *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori, Dan Aplikasinya*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI) Cetakan, 2019.
- Dra. Yufriawati, M.Si. *Sistem Zonasi Di Indonesia*. Edited by S.Psi. etak: Dr. Aos Santosa, M.Pd. Dr. Sabar Budi Raharjo Erni Hariyanti. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Redaksi:, n.d.
- Drs. Ichsan, M.Pd. *Dasar Dasar Pendidikan*, 2015.
- Fadli, Muhammad Rijal, and Dyah Kumalasari. "Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966)." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 9, no. 2 (2019): 157. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v9i2.4168>.
- Fischer, Frank. "Handbook of Public Policy Analysis_ Theory, Politics, and Methods (Public Administration and Public Policy) (PDFDrive.Com).Pdf," 2007.
- Flaxman, B. A., A. C. Sosis, and E. J. Van Scott. *Changes in Melanosome Distribution in Caucasoid Skin Following Topical Application of Nitrogen Mustard. The Journal of Investigative Dermatology*. Vol. 60, 1973. <https://doi.org/10.1111/1523-1747.ep12723167>.
- Hamruni, Syaddad Zakiah Irza A, and Dewi Isnawati Intan Putri. *Teori Belajar Behaviorisme Dalam Perspektif Pemikiran Tokoh-Tokohnya. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TEPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati. "Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa" 3, no. 2 (2018): 91–102.
- Johnson, Andrew P. "Bruner's Learning Theory." *Essential Learning Theories and Their Applications*, 2014, 1–5.
- Journal, Measurement, Sindy Widayarsi, and Fadia Azzahra. "Zoning Policy in

- Promoting Educational Equality : Analytical Review in the Context of Policy Innovation” 1, no. 2 (2024): 51–58.
- Kaffa, Zelmi, Sentot Setia Budi, and Nurhizrah Gistituat. “Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 1870–77.
- Lefa, Baken. “The Piaget Theory of Coginitve Development: And Educational Implications.” *Educational Psychology* 1, no. 1 (2014): 1–8. <https://www.researchgate.net/publication/265916960>.
- Levinson, Meira, Tatiana Geron, and Harry Brighthouse. “Conceptions of Educational Equity.” *AERA Open* 8, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.1177/2332858422121344>.
- Marselus Rubben Payong. “Zone of Proximal Development and Social Constructivism Based Education According To Lev Semyonovich Vygotsky.” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio* 12, no. 2 (2020): 164–78. <https://doi.org/10.36928/jpkm.v12i2.589>.
- Maspaitella, M. J, and Nancy Rahakbauwi. “Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial.” *Aspirasi* 5, no. 2 (2014): 157–64. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/457/354>.
- Nurwahyuni, Katwan, and Hudaidah Hudaidah. “Sejarah Sistem Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa.” *Berkala Ilmiah Pendidikan* 1, no. 2 (2021): 53–59. <https://doi.org/10.51214/bip.v1i2.91>.
- Page, September, Herlina Sakawati, and Sirajuddin Saleh. “Pinisi Discretion Review Analysis Implementation of Educational Zoning System in Indonesia” 7, no. 1 (2023): 143–50.
- Prakash Chand, Satish. “Constructivism in Education: Exploring the Contributions of Piaget, Vygotsky, and Bruner.” *International Journal of Science and Research (IJSR)* 12, no. 7 (2023): 274–78. <https://doi.org/10.21275/sr23630021800>.
- Prof. Miriam, Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Purwanti, Dian, Ira Irawati, Jossi Adiwisastra, and Herijanto Bekt. “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung.” *Jurnal Governansi* 5, no. 1 (2019): 12–23. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699>.
- Ramazan Avcu & Seher Avcu. “The Methodological Quality of Experimental STEM Education Articles Published in Scholarly Journals from 2014 to 2020.” *International Journal of Assessment Tools in Education* 9, no. 2 (2022): 290–318. <https://doi.org/10.21449/ijate.946743>.
- Rangkuti, Ahmad Nizar. *METODE PENDIDIKAN PENELITIAN Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan*, 2019.
- Rawls, John. *A Theory of Justice. Theory and Decision*. Vol. 4, 1974. <https://doi.org/10.1007/BF00136652>.
- Riley, Richard W, and Arthur L Coleman. “How to Give All Children a Real Opportunity.” *American Educator* 35, no. 1 (2011): 26–30.
- Risna, Lisdahlia, and Syamsul Edi. “Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan.” *Mappesona* 2, no. 1

- (2020): 1.
<https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/viewFile/44799/28330>.
- Roza, Darmini, and Gokma Toni Parlindungan S. "Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia." *Jurnal Cendikia Hukum* 5, no. 1 (2019): 12. <https://doi.org/10.3376/jch.v5i1.185>.
- Salahuddin, A. "Robert Nozick's Entitlement Theory of Justice, Libertarian Rights and the Minimal State: A Critical Evaluation." *Journal of Civil & Legal Sciences* 07, no. 01 (2018). <https://doi.org/10.4172/2169-0170.1000234>.
- Sidik, Fajar. "Pelaksanaan Kebijakan Zonasi Sekolah Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Sekolah Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama: Studi Kasus Di Kabupaten Sleman Yogyakarta." *Humanika* 24, no. 1 (2024): 47–56. <https://doi.org/10.21831/hum.v24i1.68551>.
- Sihombing, Riris. "Pemerataan Pendidikan: Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia." *Parahyanan Economic Development Review* 1, no. 2 (2023): 143–51. <https://doi.org/10.26593/pedr.v1i2.6670>.
- Sjamsuddin, Helius, Kosoh Sastradinata, H. Said Hamid Hasan, and Wiwi Kuswiah. "Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)." *Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional*, 1993.
- Sulistiyosari, Yunike, and Siti Irene Dwiningrum. "Social Justice In The Implementing Zoning School Policy (Case Study in Temanggung Regency)," 2020. <https://doi.org/10.4108/eai.4-8-2020.2302428>.
- Suryanti, Puji, and Dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan DI SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018." *Jurnal CANDI* 20, no. 1 (2020): 111–26.
- Syakarofath, Nandy Agustin, Ahmad Sulaiman, and Muhammad Faqih Irsyad. "Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 5, no. 2 (2020): 115–30. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>.
- Ujud, Sartika, Taslim D Nur, Yusmar Yusuf, Ningsi Saibi, and Muhammad Riswan Ramli. "Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sma Negeri 10 Kota Ternate Kelas X Pada Materi Pencemaran Lingkungan." *Jurnal Bioedukasi* 6, no. 2 (2023): 337–47. <https://doi.org/10.33387/bioedu.v6i2.7305>.
- Ula, Dany Miftahul, and Irvan Lestari. "Imbas Sistem Zonasi Bagi Sekolah Favorit Dan Masyarakat." *Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran 2019*, 2019, 195–201.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TEPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Wibowo, Bayu Ananto, Taufik Agung Pranowo, and Arip Febrianto. *Sejarah Pendidikan*. UPY Press, 2023.

